



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

- Laporan Realisasi Anggaran
 - Laporan Operasional
 - Neraca
 - Laporan Perubahan Ekuitas

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i-1
Daftar Isi	ii-1
Bab I Pendahuluan	I-1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	I-1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	I-4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	I-6
Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	II-1
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	II-1
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan ...	II-5
Bab III Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Keuangan	III-1
3.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca	III-1
3.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	III-13
3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	III-14
3.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	III-17
Bab IV Informasi Non Keuangan	IV-1
4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	IV-1
Bab V Penutup	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki tujuan utama untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan ini digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan adalah catatan yang memuat informasi keuangan dari suatu entitas baik itu perusahaan, badan usaha, maupun instansi pemerintah pada periode akuntansi tertentu. Laporan ini dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan entitas tersebut. Sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan ini juga mencakup berbagai aspek terkait penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Hal ini melibatkan lembaga yang terlibat, seperti penyusunan standar akuntansi, badan pengawas pemerintah, dan entitas pelapor, serta peraturan yang berlaku, termasuk Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) (Wikipedia, 2018).

Laporan keuangan juga merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Dalam konteks Pemerintah Daerah, laporan keuangan ini merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Proses penyusunan laporan ini dilakukan dengan cara menggabungkan laporan keuangan dari kedua entitas tersebut (Efrianti, 2014).

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik bagi pengguna maupun

pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Entitas akuntansi dalam pemerintahan adalah unit yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi serta menyajikan laporan keuangan. Dalam hal ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset daerah. SKPD, sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang (PB), wajib menyusun laporan keuangan yang menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi terkait nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan. Laporan ini juga bertujuan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan umum dari penyusunan laporan keuangan, menurut Paragraf 9 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan. Informasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan terkait alokasi sumber daya.

Tujuan-tujuan spesifik dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh dan mengalokasikan sumber daya ekonomi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
3. Menyediakan informasi mengenai upaya pemerintah daerah dalam mendanai seluruh kegiatan serta mencukupi kebutuhan kas.
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah daerah terkait sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, baik kenaikan maupun penurunan, sebagai hasil dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
6. Menyediakan informasi mengenai ketaatan terhadap realisasi anggaran yang telah ditetapkan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam mendanai aktivitasnya.
8. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan ini digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan, serta membantu memastikan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD menyajikan informasi terkait sumber daya dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, surplus/defisit dalam Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas akuntansi.

Komponen laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional (LO)
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah (SKPKD) berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara republic Negara Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang;
14. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kota Singkawang.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan penjelasan dari catatan atas laporan keuangan terbagi atas 5 (Lima) bab yang secara garis besar uraian dari masing-masing bab sebagai berikut :

Bab. I. Pendahuluan.

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab.II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab. III Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan

- 3.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 3.1.1 Aset
 - 3.1.2 Ekuitas
- 3.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.2.1 Belanja Operasi
 - 3.2.2 Belanja Modal
- 3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 3.3.1 Beban Operasi

Bab IV. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemda

Bab V. Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menggambarkan tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD sebagai entitas akuntansi, baik dari segi fisik maupun keuangan. Dari data ini, dapat dianalisis kinerja SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan dalam DPA-SKPD masing-masing.

Secara umum, pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dalam DPA menunjukkan bahwa jika dinilai secara fisik, rata-rata pencapaian kinerja SKPD mencapai 100%. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan sumber dana yang tersedia dalam APBD serta ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan ini juga didorong oleh adanya komitmen dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, baik di tingkat internal SKPD maupun dengan instansi lain yang mendukung pelaksanaan program.

Meskipun demikian, realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatan tersebut belum mencapai angka 100%. Hal ini disebabkan oleh adanya dana atau sisa anggaran yang tidak terserap pada beberapa pos belanja, seperti belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai, termasuk gaji, yang merupakan bentuk penghematan. Penghematan ini sejalan dengan upaya SKPD untuk memanfaatkan anggaran secara optimal dan efisien, serta mencerminkan keseriusan dalam menciptakan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab. Penghematan ini tidak mengurangi kualitas pelaksanaan program, bahkan menjadi indikator dari efektivitas pengelolaan anggaran dalam merespons kebutuhan prioritas.

Pencapaian kinerja keuangan ini tercermin pada pencapaian atau realisasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran ini menunjukkan bahwa SKPD memiliki tingkat efisiensi yang baik dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan. Berikut ini disajikan gambaran mengenai realisasi APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Singkawang untuk Tahun Anggaran 2024, beserta perbandingan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023, yang akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai tren dan perbaikan kinerja keuangan dari waktu ke waktu.

TABEL 2.1
GAMBARAN LAPORAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAPPEDA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2024

Uraian	Jumlah Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase %	Realisasi 2023 (Rp)
BELANJA DAERAH	7.755.879.961,00	7.467.497.097,00	96,28	7.056.181.313,00
BELANJA OPERASI	7.421.397.131,00	7.168.925.380,00	96,60	6.541.721.313,00
BELANJA MODAL	334.482.830,00	298.571.717,00	89,26	514.460.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
SURPLUS / DEFISIT	(7.755.879.961,00)	(7.467.497.097,00)	96,28	(7.056.181.313,00)

Sumber: data diolah, 2024

Dari tabel diatas, Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Bappeda Kota Singkawang tahun anggaran 2024 mencapai 96,28 %

Target kinerja keuangan tersebut dicapai melalui realisasi Anggaran Bappeda Tajun 2024 Sebesar Rp. 7.467.497.097,00 atau 96,28% dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 7.755.879.961,00 terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 7.421.397.131,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.168.925.380,00 atau sebesar 96,60%
2. Belanja Modal sebesar Rp. 334.482.830,00 dengan realisasi sebesar Rp. 298.571.717,00 atau sebesar 89,26%

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Belanja Langsung Bappeda Kota Singkawang tahun anggaran 2024 berdasarkan Program dan kegiatan sebagai berikut :

Iktisar pencapaian kinerja Bappeda Kota Singkawang sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	% Pencapaian		
		Anggaran 2024	Realisasi 2024	Persentase
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.124.868.494,-	5.879.666.868,-	96,00%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.632.475,-	100.370.095,-	96,85%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.282.988.383,-	3.123.436.671,-	95,14%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.360.840,-	38.390.450,-	95,12%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	178.132.680,-	164.236.216,-	92,20%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.088.865.307,-	1.078.229.318,-	99,02%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	334.482.830,-	298.571.717,-	89,26%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	767.907.223,-	761.602.731,-	99,18%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328.498.756,-	314.829.670,-	95,84%

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No	Kegiatan	% Pencapaian		
		Anggaran 2024	Keuangan	Fisik
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	564.836.819,-	553.433.246,-	97,98%
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	371.817.688,-	370.247.709,-	99,58%
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	114.999.400,-	107.737.187,-	93,68%
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	78.019.731,-	75.448.350,-	96,70%

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kegiatan	% Pencapaian		
		Anggaran 2024	Keuangan	Fisik
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	341.055.580,-	334.171.816,-	97,98%
1	Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	125.077.680,-	123.239.608,-	98,53%
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia)	108.992.570,-	105.630.174,-	96,92%
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	106.985.330,-	105.302.034,-	98,43%

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No	Kegiatan	% Pencapaian		
		Anggaran 2024	Keuangan	Fisik
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	725.119.068,-	700.225.167,-	96,57%
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependuduk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	35.658.050,-	33.592.150,-	94,21%
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	359.901.000,-	357.827.139,-	99,42%
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	329.560.018,-	308.805.878,-	93,70%

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

2.2.1. Kendala yang masih dihadapi Bappeda Kota Singkawang dalam pencapaian target belanja antara lain adalah:

Permasalahan mengenai belanja daerah tahun 2024 ini relatif tidak begitu berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tingkat kompleksitas tentang keuangan yang tinggi terutama yang terkait dengan pengelolaan belanja dan masih berjalannya proses pembelajaran terhadap siklus pengelolaan keuangan yang baik dan benar dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan, beberapa hambatan dan kendala masih dihadapi oleh Bappeda Kota Singkawang, yang menghambat efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian hasil yang optimal. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Terdapatnya perbedaan persepsi pada pemahaman peraturan-peraturan dalam pengelolaan keuangan yang terus berkembang sehingga menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan.

- b. Masih kurangnya SDM yang mempunyai kualitas memadai dalam mengelola keuangan teknologi informasi baik pejabat (pengguna informasi) serta kurangnya dukungan kebijakan atau kurang tegasnya komitmen dari atasan untuk mengembangkan teknologi informasi.
- c. Perubahan Peraturan dan Kebijakan yang sering dihadapi adalah sering terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan anggaran. Perubahan ini sering kali memerlukan penyesuaian dalam prosedur dan dokumentasi yang sudah disiapkan, sehingga dapat mengganggu kelancaran proses pengelolaan dan penyerapan anggaran. Ketidakpastian ini menghambat Bappeda dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara tepat waktu dan sesuai anggaran.
- d. Keterlambatan Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan menjadi salah satu kendala signifikan dalam pencapaian target belanja. Keterlambatan ini biasanya disebabkan oleh proses administrasi yang panjang, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta kendala dalam verifikasi anggaran dan kontrak yang mengakibatkan terhambatnya implementasi kegiatan.
- e. Ketergantungan pada Anggaran yang Terbatas Anggaran yang tersedia tidak selalu mencukupi untuk melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan, terutama untuk kegiatan yang bersifat mendesak atau prioritas. Ketergantungan pada alokasi anggaran yang terbatas membuat Bappeda seringkali kesulitan dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan rencana, sehingga menghambat pencapaian target belanja yang telah ditetapkan.
- f. Tantangan dalam Pengelolaan Belanja Modal Pengelolaan belanja modal sering kali mengalami kendala dalam hal perencanaan dan realisasi. Proses pengadaan dan pelaksanaan belanja modal yang rumit, serta kesulitan dalam koordinasi antar instansi yang terlibat, menghambat pencapaian target belanja modal yang telah

ditetapkan. Akibatnya, sebagian anggaran untuk belanja modal tidak terserap secara optimal, yang berdampak pada keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang direncanakan.

- g. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi Meskipun ada upaya untuk mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan, masih terdapat keterbatasan dalam infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data keuangan secara real-time, yang dapat memperlambat proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan belanja. Ketidaktersediaan sistem yang terintegrasi juga menghambat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Solusi yang diambil untuk menyikapi hal diatas adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan bimbingan teknis dan pengelolaan keuangan baik dalam hal perencanaan, penatausahaan dan pelaksanaan serta fungsi pertanggungjawaban dalam lingkup pengelolaan keuangan;
- b. Mengadakan koordinasi dan hubungan yang komunikatif dalam rangka membangun iklim yang dinamis antar fungsi pengelola keuangan daerah;
- c. Pengembangan teknologi informasi pengelola keuangan daerah yang didukung sarana dan prasarana diantaranya SDM yang memadai, hardware dan software yang membantu secara maksimal serta perlunya kebijakan tertulis maupun peraturan yang memwadahi satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data keuangan secara elektronik;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana kerja sebagai fasilitas penunjang dan pelaksana sistem pengelolaan keuangan yang efektif dalam rangka menuju good government dan good governance juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
- e. Perbaikan Infrastruktur Teknologi Informasi dengan pengadaan perangkat keras dan lunak yang lebih canggih serta pelatihan penggunaan sistem bagi pegawai pengelola keuangan.

TABEL 2.2
REALISASI ANGGARAN
PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
BAPPEDA KOTA SINGKAWANG

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	96,00%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	96,85%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	97,88%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	100%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	93,16%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1 Dokumen	81,54%	SPJ tidak dapat di cairkan karena terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan bidang atau DL	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	100%	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	100%	-	-

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	100%	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	95,14%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	95,20%	Di realisasikan sesuai kebutuhan dan data usulan	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	93,42%	Terjadi kesalahan dalam pengentrian honorarium PPK	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	98,87%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	95,12%		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	97,14%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	90,89%	SPJ tidak dapat di cairkan karena terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan bidang atau DL	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	95,28%	SPJ tidak dapat di cairkan karena terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan bidang atau DL	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	97,14%	SPJ tidak dapat di cairkan karena terdapat jadwal lembur yang bertepatan dengan bidang atau DL	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	92,20%		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	98,62%	Belanja sesuai dengan harga pasar	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	160 Orang	85,62%	Anggaran tidak dapat terserap semua karena keterbatasan waktu dan kegiatan Bappeda yang sangat padat	Akan mengevaluasi proses perencanaan dan pelaksanaan yang lebih matang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	99,02%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	99,25%	Belanja sesuai dengan tagihan toko	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	98,08%	Belanja sesuai dengan tagihan toko	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	100%	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	99,95%	Belanja sesuai dengan tagihan toko	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	99,75%	Belanja sesuai dengan tagihan toko	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	64,14%	Direalisasikan sesuai tagihan koran	Akan di upayakan perencanaan yang lebih baik
Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	99,98 %	Belanja sesuai dengan tagihan toko	Akan di upayakan perencanaan yang lebih matang

Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100%	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	99,32%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	89,26%		
Pengadaan Mebel	121 Unit	99,13%	Adanya sisa pengadaan akibat selisih anggaran dengan harga pasar	Akan di upayakan perencanaan yang lebih baik
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	84,73%	Adanya sisa pengadaan akibat selisih anggaran dengan harga pasar	Akan di upayakan perencanaan yang lebih baik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,18%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	98,15%	Adanya sisa pengadaan akibat selisih anggaran dengan tagihan	Akan di upayakan perencanaan yang lebih baik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	99,50%	Direalisasikan sesuai dengan kunjungan tamu	Akan di upayakan perencanaan yang lebih baik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	95,84%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	84,86%	Pemeliharaan digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional	Akan di upayakan perencanaan yang lebih baik

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31 Unit	100%	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	99,27%	Adanya sisa pengadaan akibat selisih anggaran dengan harga kontrak	Akan diupayakan Perencanaan yang lebih baik
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100%	97,98%		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	99,58%		
Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Berita Acara	99,71%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	99,45%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	99,61%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	93,68%		
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	93,68%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	97,70%		
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	96,70%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	97,98%		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	98,53%		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	98,37%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	97,74%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	99,85%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	99,02%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	97,34%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	98,16%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Perencanaan Pembangunan	100%	96,92%		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	98,95%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	92,02%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepannya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	100%	-	-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	87,66%	Bekaitan dengan padatnya kegiatan bappeda mengakibatkan kegiatan makan dan minum tidak terserap	Kedepannya akan lebih teliti dalam penjadwalan kegiatan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	97,25%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepannya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	100%	-	-

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	98,43%		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	99,17%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	96,52%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	99,62%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	98,05%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	97,83%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	99,56%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100%	96,57%		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	96,57%		
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Laporan	94,21%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	99,42%		
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	99,42%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	93,70%		
Daerah yang Bersifat Inovatif Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah	1 Laporandokumen	92,78%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Sosialisasi dan Dimenasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	98,95%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	93,11%	Efisiensi anggaran atau sisa Kelebihan perhitungan anggaran	Untuk kedepanya lebih teliti lagi dalam menginput di anggarkan

BAB III

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Selain itu, penjelasan ini juga mencakup pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan, yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan entitas.

Dalam penjelasan pos-pos neraca ini, diuraikan secara sistematis mengenai posisi keuangan berdasarkan klasifikasi aset, liabilitas (kewajiban atau hutang), dan ekuitas, serta perubahan yang terjadi selama periode berjalan. Informasi yang disajikan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pemahaman terhadap kondisi keuangan yang dicerminkan dalam neraca.

Penjelasan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan pada akhir tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1. PENJELASAN POS NERACA

<u>No.</u>	<u>PENJELASAN NERACA</u>	<u>Per 31 Desember 2024</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>
3.1.1.1. ASET		19.054.413.677,59	18.774.209.636,89
	Aset merupakan salah satu pos yang tercantum dalam Necara Bappeda Kota Singkawang, Aset dapat diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset lainnya. Total Aset per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 terdiri dari:		
	1. Aset Lancar	1.190.400,00	579.500,00
	2. Aset Tetap	19.045.231.277,59	18.761.642.136,89
	3. Aset Lainnya	7.992.000,00	11.988.000,00
	Jumlah Aset	19.054.413.677,59	18.774.209.636,89

<u>No.</u>	<u>PENJELASAN NERACA</u>	<u>Per 31 Desember 2024</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>
	Penjelasan :		
	Dari data diatas terlihat bahwa terdapat kenaikan aset yang dimiliki oleh Bappeda kota singkawang pada Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp19.054.413.677,59 meningkat sebesar Rp280.204.040,70 atau 1,49 persen. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:		
	1) Pada Aset Lancar sisa stock opname pada tahun 2024 lebih banyak di bandingkan tahun 2023.		
	2) Pada Aset Tetap mengalami kenaikan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023.		
	3) Pada Aset lainnya terjadi penurunan di tahun 2024 di karenakan adanya akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.		
1.	ASET LANCAR	1.190.400,00	579.500,00
	Aset Lancar yang ada didalam Neraca terdiri dari persediaan barang pakai habis. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. Aset Lancar yang ada didalam Neraca per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp1.190.400,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp579.500,00. Yang terdiri dari:		
	1) Persediaan Alat Tulis Kantor	1.049.200,00	335.500,00
	2) Persediaan Kertas dan Cover	141.200,00	244.000,00
	Jumlah Aset Lancar	1.190.400,00	579.500,00

No.	PENJELASAN NERACA	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
2.	ASET TETAP	19.045.231.277,59	18.761.642.136,89
	Total Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.045.231.277,59 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.761.642.136,89 mengalami kenaikan sebesar Rp283.589.140,70 atau 1,51 persen. Nilai Aset di atas merupakan akumulasi dari nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Berikut rincian perbandingan aset tetap yaitu:		
	1) Tanah	17.459.831.643,93	17.459.831.643,93
	2) Peralatan dan Mesin	4.497.350.781,00	4.197.838.281,00
	3) Gedung dan Bangunan	1.166.210.550,00	943.674.900,00
	4) Jalan Jaringan dan Irigasi	71.094.600,00	71.094.600,00
	5) Aset Tetap Lainnya	6.480.000,00	6.480.000,00
	6) Akumulasi Penyusutan	(4.155.736.297,34)	(3.917.277.288,04)
	Jumlah Aset Tetap	19.045.231.277,59	18.761.642.136,89

Penjelasan Aset Tetap :

Dari rincian aset tetap di atas, maka nilai aset tetap Bappeda Kota Singkawang per 31 Desember 2024 bertambah sebesar Rp283.589.140,70. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:

a. Tanah

Nilai Tanah pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp17.459.831.643,93 tidak mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan dengan periode per 31 Desember 2023.

17.459.831.643.93

17.459.831.643.93

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp4.497.350.781,00 naik sebesar Rp299.512.500,00 jika dibandingkan dengan periode per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.197.838.281,00.

4.497.350.781,00

4.197.838.281,00

<u>No.</u>	<u>PENJELASAN NERACA</u>	<u>Per 31 Desember 2024</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>
	Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari nilai per 31 Desember 2023 dan mutasi bertambah Tahun 2024. Dengan rincian sebagaimana diuraikan berikut :		
	- Alat Angkutan	905.165.000,0	628.454.000,0
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.937.500,00	8.937.500,00
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.500.881.923,000	1.436.827.423,0
	- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	309.305.169,00	329.355.169,00
	- Komputer	1.759.047.189,00	1.780.250.189,00
	- Peralatan Olahraga	14.014.000,00	14.014.000,00
	Jumlah Peralatan dan Mesin	4.497.350.781,00	4.197.838.281,00

Penjelasan :

- 1) Alat Angkutan Bertambah sebesar Rp276.711.000 di karenakan adanya mutasi masuk dan keluar yaitu: Mutasi Masuk pada Alat kantor lainnya berupa Mini Bus dengan nomer mutasi 100.3.3.6/22/BD-02. Aset Tahun 2024 Tanggal 13 Mei 2024 sebesar RP310.515.000,00. Mutasi Keluar pada Alat kantor lainnya berupa Sepeda Motor dengan nomer mutasi 100.3.3.6 /25/BD-02. Aset Tahun 2024 Tanggal 20 MEI 2024 sebesar RP33.804.000,00
- 2) Alat Kantor Dan Rumah Tangga Bertambah sebesar Rp64.054.500,00 di karenakan adanya :
 - Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp145.921.717,00
 - Adanya penghapusan tahun berjalan sebesar Rp57.480.500,00 yaitu pada belanja LCD Proyektor sebesar Rp37.547.000,00 Alat Pendingin Rp15.933.500,00 dan pada Televisi sebesar Rp4.000.000,00

- Adanya Koreksi Kurang Tahun Berjalan karena barang tidak sesuai dengan kriteria belanja modal berupa belanja Sarung kursi sebesar Rp22.366.717,00
 - Adanya Reklas tahun berjalan sebesar Rp2.020.000,00 berupa kaca cermin dan teko.
- 3) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar terjadi penurunan di karenakan adanya:
- Belanja modal sebesar Rp18.600.000,00 yaitu pada item belanja proyektor sebesar Rp12.900.000,00 dan layar Proyektor sebesar Rp5.700.000,00.
 - Penghapusan sebesar Rp38.650.000,00 yaitu pada item belanja UPS sebesar Rp17.650.000,00 dan belanja handy cam sebesar Rp21.000.000,00.
- 4) Komputer berkurang sebesar Rp21.203.000,00 di karenakan adanya:
- Belanja Modal Laptop sebesar Rp115.750.000,00 dan belanja Printer sebesar Rp18.300.000,00
 - Adanya Mutasi Masuk berupa Note Book sebesar Rp35.080.000,00, Printer Epson sebesar Rp2.800.000,00 dan Pointer sebesar Rp1.259.000,00 dengan nomer mutasi masuk 100.3.3.6/22/BD-02.Aset Tahun 2024 Tanggal 13 Mei 2024.
 - Penghapusan Tahun Berjalan sebesar Rp194.392.000,00 yang terdiri dari :
 - a) Belanja PC sebesar Rp60.542.000,00

<u>No.</u>	<u>PENJELASAN NERACA</u>	<u>Per 31 Desember 2024</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>
b)	Belanja Laptop sebesar Rp9.800.000,00		
c)	Belanja Note Book sebesar Rp90.555.000,00		
d)	Belanja Tablet sebesar Rp23.515.000,00		
e)	Belanja Printer sebesar Rp9.980.000,00		

c. Gedung dan Bangunan**1.166.210.550,00****943.674.900,00**

Pada Belanja Gedung dan Bangunan belanja bangunan Gedung kantor yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor, di lakukan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa tahun berjalan agar anggaran sesuai dengan standar akuntansi Nilai Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2024 sebesar Rp1.166.210.550,00 naik sebesar Rp222.535.650,00 jika dibandingkan dengan periode per 31 Desember 2023 sebesar Rp943.674.900,00.

**Total Gedung dan Bangunan
Penjelasan :**

- Saldo Awal tahun 2023	943.674.900,00
- Kapitalisasi Belanja barang dan jasa	<u>222.535.650,00</u>

Total Gedung dan Bangunan	1.166.210.550,00
----------------------------------	-------------------------

Penjelasan :

Pada Gedung dan bangunan terjadi kenaikan di karenakan adanya Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp222.535.650,00. Pada Belanja Pemeliharaan Gedung kantor direklasifikasi ke belanja modal pemeliharaan Gedung kantor karena terjadi kesalahan dalam penganggaran tahun 2024. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa terdiri dari yaitu:

<u>No.</u>	<u>PENJELASAN NERACA</u>	<u>Per 31 Desember 2024</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>
	- Perencanaan pemeliharaan gedung sebesar Rp18.009.750,00		
	- Pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp187.043.400,00		
	- Pengawasan pemeliharaan gedung sebesar Rp17.482.500,00		
d.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.094.600,00	71.094.600,00
	Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 31 Desember 2024 sebesar Rp71.094.600,00 jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan dan penurunan.		
e.	Aset Tetap Lainnya	6.480.000,00	6.480.000,00
	Nilai Aset Tetap Lainnya terdiri dari Bahan Perpustakaan, yaitu buku perpustakaan. Buku Perpustakaan pada periode 31 Desember 2024 nilainya sama dengan nilai per 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp6.480.000,00. Jadi pada nilai aset tetap lainnya tidak ada mengalami kenaikan atau penurunan pada periode 31 Desember 2024.		
f.	Akumulasi Penyusutan	(4.155.736.297,34)	(3.917.277.288,04)
	Akumulasi penyusutan mengalami kenaikan di karenakan masa umur barang bertambah. Nilai Akumulasi Penyusutan periode 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.155.736.297,34) naik sebesar (Rp238.459.009,30) dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.912.777.288,04) dengan rincian sebagai berikut:		
1)	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.894.803.810,00)	(3.691.659.948,00)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar		

(Rp203.143.862,00) disebabkan karena:

- a) Akumulasi penyusutan kendaraan bermotor penumpang mengalami kenaikan sebesar (Rp194.071.875,00) karena adanya mutasi masuk yaitu Mini Bus;
- b) Akumulasi penyusutan kendaraan bermotor beroda dua mengalami penurunan sebesar (Rp31.475.250,00) karena adanya mutasi keluar yaitu sepeda motor (Rp33.804.000,00) dan akumulasi penyusutan di tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar (Rp2.328.750,00);
- c) Akumulasi penyusutan alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor ditahun berjalan 2024 naik sebesar (Rp1.694.000,00) yaitu lemari besi dan lemari kaca.
- d) Akumulasi penyusutan alat kantor-alat kantor lainnya mengalami penurunan sebesar (Rp37.281.000,00) yaitu:
 - Pada barang peta akumulasi penyusutannya naik sebesar (Rp266.000,00);
 - Akumulasi penyusutan pada mesin absensi turun sebesar (Rp850.000,00) karena terjadinya reklasifikasi;
 - Akumulasi penyusutan pada LCD Projector/Infocus menurun sebesar (Rp37.547.000,00) karena adanya penghapusan barang di tahun berjalan;
 - Terjadinya penambahan akumulasi penyusutan pada alat kantor lainnya lain-lain karena adanya reklasifikasi sebesar (Rp850.000,00).

- e) Akumulasi penyusutan alat rumah tangga-mebel mengalami kenaikan di tahun berjalan sebesar (Rp22.853.100,00);
- f) Akumulasi penyusutan alat rumah tangga-alat pendingin mengalami kenaikan sebesar (Rp9.371.142,00) disebabkan karena di tahun berjalan naik sebesar (Rp25.304.642,00) dan mengalami penurunan sebesar (Rp15.933.500,00) karena adanya penghapusan.
- g) Akumulasi penyusutan alat rumah tangga-Home Use naik sebesar (Rp5.751.960,00) karena akumulasi penyusutan naik sebesar (Rp9.751.960,00) dan ada penghapusan aset sehingga akumulasi penyusutannya berkurang (Rp4.000.000,00).
- h) Akumulasi penyusutan alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran naik sebesar (Rp1.800.000,00) karena umur ekonomis aset berkurang.
- i) Akumulasi penyusutan meja kerja pejabat naik sebesar (Rp3.227.600,00) karena umur ekonomis aset berkurang.
- j) Akumulasi penyusutan meja rapat pejabat naik sebesar (Rp1.610.000,00) karena umur ekonomis aset berkurang.
- k) Akumulasi penyusutan kursi kerja pejabat naik sebesar (Rp9.858.080,00) karena umur ekonomis aset berkurang.
- l) Akumulasi penyusutan lemari dan arsip pejabat naik sebesar (Rp5.280.000,00) karena umur ekonomis aset berkurang.

- m) Akumulasi penyusutan peralatan studio audio berkurang sebesar (Rp24.079.020,00) disebabkan adanya penghapusan aset sebesar (Rp38.340.000,00) dan akumulasi penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp14.260.980,00) karena umur ekonomis aset berkurang.
- n) Akumulasi penyusutan peralatan studio video dan film naik sebesar (Rp6.730.000,00) karena umur ekonomis aset berkurang.
- o) Akumulasi penyusutan alat studio lainnya naik sebesar (Rp8.658.000,00) karena umur ekonomis aset berkurang.
- p) Akumulasi penyusutan komputer jaringan naik sebesar (Rp499.750,00) karena umur ekonomis aset berkurang.
- q) Akumulasi penyusutan personal komputer berkurang sebesar (Rp13.582.750,00) disebabkan adanya penghapusan aset sebesar (Rp184.412.000,00), mutasi masuk sebesar (Rp35.080.000,00) dan akumulasi penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp135.749.250,00) karena umur ekonomis aset berkurang.
- r) Akumulasi penyusutan peralatan mainframe naik sebesar (Rp3.659.000,00) disebabkan adanya mutasi masuk sebesar (Rp1.259.000,00) dan akumulasi penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp2.400.000,00) karena umur ekonomis aset berkurang.

<u>No.</u>	<u>PENJELASAN NERACA</u>	<u>Per 31 Desember 2024</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>
	<p>s) Akumulasi penyusutan peralatan personal komputer naik sebesar (Rp15.345.000,00) disebabkan adanya penghapusan aset sebesar (Rp9.980.000,00) dan akumulasi penyusutan tahun 2024 sebesar (Rp24.625.000,00) karena umur ekonomis aset berkurang.</p> <p>t) Akumulasi penyusutan peralatan jaringan naik sebesar (Rp10.244.625,00) karena umur ekonomis aset berkurang.</p> <p>u) Akumulasi penyusutan peralatan komputer lainnya naik sebesar (Rp8.907.750,00) disebabkan karena umur ekonomis aset berkurang.</p>		
	2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(233.678.197,34)	(200140.415,04)
	<p>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar (Rp33.537.782,30) disebabkan karena ada penambahan nilai aset bangunan gedung kantor di tahun 2024 dan berkurangnya masa umur ekonomis aset, sehingga akumulasi penyusutannya naik sebesar (Rp25.525.115,61).</p>		
	<p>Akumulasi penyusutan rumah negara golongan I naik sebesar (Rp8.012.666,67) disebabkan karena umur ekonomis aset berkurang. Akumulasi penyusutannya sebesar (Rp8.012.666,65) dan terdapat hasil koreksi pembulatan pada tahun berjalan sebesar (Rp0,02).</p>		

<u>No.</u>	<u>PENJELASAN NERACA</u>	<u>Per 31 Desember 2024</u>	<u>Per 31 Desember 2023</u>
3)	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(27.254.290,00)	(25.476.925,00)
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi naik sebesar (Rp1.777.365,00) disebabkan karena umur ekonomis aset berkurang.		
3.	ASET LAINNYA	7.992.000,00	11.988.000,00
	Dalam Aset Lainnya terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Nilai Aset Lainnya pada periode 31 Desember 2024 sebesar:		
	- Aset Tidak Berwujud	470.610.000,00	470.610.000,00
	- Aset Lain-lain	161.503.250,00	492.074.250,00
	- Akumulasi Amortisasi Aset	(462.618.000,00)	(458.622.000,00)
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(161.503.250,00)	(492.074.250,00)
	Jumlah	7.992.000,00	11.988.000,00

Penjelasan:

Terjadinya penurunan nilai aset pada Aset lain-lain sebesar Rp330.571.000,00 disebabkan karena adanya penghapusan aset tahun 2024 sehingga akumulasi penyusutan aset lainnya juga berkurang sebesar (Rp330.571.000,00).

Akumulasi amortisasi aset naik sebesar Rp3.996.000,00 karena adanya penambahan umur ekonomis aset tidak berwujud (Software).

3.1.1. Ekuitas

Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.054.413.677,59 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.774.209.636,89.

3.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.2.1. Belanja Daerah

Total Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.467.497.097,00 atau 96,28 persen dari target Rp7.755.879.961,00 dan untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.056.181.313,00 atau 92,33. Dalam belanja daerah terdapat dua belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp7.168.925.380,00 atau 96,60 persen dan belanja modal terealisasi sebesar Rp298.571.717,00 atau 89,26 persen.

3.2.1.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp7.168.925.380,00 atau 96,28 persen dari anggaran Rp7.421.397.131,00 dan untuk Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp7.056.181.313,00 dengan rincian sebagai berikut

TABEL 3.9
BELANJA OPERASI

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi		
Belanja Pegawai	3.226.088.773,00	3.071.093.371,00	95,20	2.934.680.708,00
Belanja Barang dan Jasa	4.195.308.358,00	4.097.832.009,00	97,68	3.607.040.605,00
Jumlah	7.421.397.131,00	7.168.925.380,00	96,60	7.056.181.313,00

Sumber: data diolah, 2024

3.2.1.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ini terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp298.571.717,00 atau 89,26 persen dari anggaran Rp334.482.830,00 dan untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp702.270.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL 3.10
BELANJA MODAL**

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.482.830,00	298.571.717,00	89,26	514.460.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	187.810.000,00
Jumlah	334.482.830,00	298.571.717,00	89,26	702.270.000,00

Sumber: data diolah, 2024

3.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

3.3.1. Beban - LO

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang yang telah diterima. Dalam laporan operasional terdiri dari Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Beban per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.344.652.556,28 naik sebesar Rp527.632.434,11 atau 7,18 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.817.018.122,17 dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL 3.11
BEBAN-LO**

Uraian	Anggaran (Rp) 2024	Anggaran (Rp) 2023	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
Beban Operasi	6.970.165.547,00	6.475.639.713,00	494.525.834,00	7,09
Beban Penyusutan dan Amortisasi	374.175.009,28	341.378.409,17	32.796.600,11	8,77
Jumlah	7.344.652.556,28	6.817.018.122,17	527.632.434,11	7,18

Sumber: data diolah, 2024

3.3.2.1. Beban Operasi

Beban operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.970.165.547,00 naik sebesar Rp494.525.834,00 atau 7,09 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.475.639.713,00 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.12
BEBAN OPERASI

Beban Operasional	Realisasi 2024	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Realisasi 2023
Beban Pegawai	3.071.093.371,00	136.412.663,00	2.934.680.708,00
Beban Barang dan Jasa	3.874.685.459,00	333.729.545,00	3.540.959.005,00
JUMLAH	6.970.165.547,00	494.525.834,00	6.475.639.713,00

Sumber: data diolah, 2024

3.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.071.093.371,00 naik sebesar Rp136.412.663,00 atau 4,44 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.934.680.708,00 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.13
BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.978.571.862,00	1.804.364.580,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.019.211.509,00	999.336.128,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	73.310.000,00	130.980.000,00
JUMLAH	3.071.093.371,00	2.934.680.708,00

Sumber: data diolah, 2023

3.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.874.696.059,00 naik sebesar Rp333.737.054,00 atau 8,61 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.540.959.005,00 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.14
BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Beban Barang	1.309.478.609,00	744.238.934,00
Beban Jasa	1.477.646.720,00	1.052.328.029,00
Beban Pemeliharaan	85.866.420,00	111.709.839,00
Beban Perjalanan Dinas	951.693.732,00	1.620.082.203,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49.999.978,00	12.600.000,00
JUMLAH	3.874.685.459,00	3.540.959.005,00

Sumber: data diolah, 2024

3.3.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah nilai penyusutan pada tahun berjalan. Nilai tersebut merupakan selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Realisasi beban penyusutan tahun 2024 adalah sebesar Rp374.175.009,28 turun sebesar Rp32.796.600,11 atau 8,77 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp341.378.409,17 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.15
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	334.863.862,00	288.854.728,60
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.537.782,28	26.744.315,57
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.777.365,00	1.777.365,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.996.000,00	24.002.000,00
JUMLAH	374.175.009,28	341.378.409,17

Sumber: data diolah, 2024

3.4. PENJELASAN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Pada Laporan perubahan ekuitas terdapat pembulatan (0,02) dikarenakan pada tahun 2023 ada kesalahan pembulatan akumulasi penyusutan. Perubahan ekuitas nilai aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

TABEL 3.16
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

URAIAN	2024
EKUITAS AWAL	18.774.209.636,89
RK PPKD	7.467.497.097,00
Surplus/Defisit - LO	(7.344.650.556,28)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	0,00
Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap	157.357.500,00
Ekuitas Mutasi Keluar Aset Tetap	0,00
Pembulatan	(0.02)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	19.054.413.677,59

Sumber: data diolah, 2024

1.4.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp18.774.209.636,89 Ekuitas awal merupakan nilai aset Bappeda Tahun 2023 terdiri dari :

- Aset Lancar : Rp 579.500,00
- Aset Tetap : Rp18.761.642.136,89
- Aset lainnya : Rp 11.988.000,00
- Jumlah Aset : Rp18.774.209.636,89
- Jumlah Ekuitas awal : Rp18.774.209.636,89

1.4.2 RK PPKD

RK PPKD merupakan jumlah kas yang dikeluarkan oleh BUD untuk kegiatan Bappeda Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.467.497.097,00

1.4.3 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(7.344.650.556,28).

1.4.4 Ekuitas Akhir

Saldo akhir Ekuitas Bappeda Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.054.413.677,59. Ekuitas akhir merupakan nilai aset Bappeda Tahun 2024 terdiri dari :

- Aset Lancar : Rp 1.190.400,00
- Aset Tetap : Rp19.045.231.277,59
- Aset lainnya : Rp 7.992.000,00
- Jumlah Aset : Rp19.054.413.677,59
- Jumlah Ekuitas awal : Rp19.054.413.677,59

BAB IV

INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

BAPPEDA merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang. Bappeda di pimpin oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa Bappeda Kota Singkawang adalah sebuah lembaga yang diberi kewenangan untuk menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di wilayah Kota Singkawang. Selain itu, BAPPEDA Kota Singkawang juga diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan tersebut maka struktur organisasi Bappeda Kota Singkawang terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat yang terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
- c. Bidang–bidang yang terdiri dari:
 - a) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - b) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
 - c) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - d) Tugas Sub-Koordinator
 - e) Penentuan Penetapan Sub Koordinator

1. Tugas dan Fungsi BAPPEDA

BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 118 Tahun 2021, Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Dengan fungsi Bappeda sebagaimana sebagaimana uraian sebelumnya dari masing-masing jabatan di lingkungan Kelembagaan Bappeda Kota Singkawang sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Tugas Kepala BAPPEDA adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Penetapan sasaran strategis bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Penetapan program kerja di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pembinaan pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur, pembinaan penelitian dan pengembangan daerah;
- g. Pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan administrasi Badan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan. Sekretariat BAPPEDA mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyusunan program kerja dibidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mengkoordinasikan Sub Bagian yang terdiri:

- (1) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
 3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang umum, kepegawaian dan aset;
 5. Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material;
 6. Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan budaya kerja;
 8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan;
 9. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa

- peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
10. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
 11. Melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 12. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
 13. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat;
 14. Melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
 15. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya;
 16. Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;
 17. Menyusun konsep naskah dinas bidang umum,kepegawaian dan aset;

18. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang telah dilaksanakan;
 19. Melaporkan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset kepada Sekretaris; dan
 20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan Evaluasi kerja Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
 2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan
 5. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 6. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD;
 7. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, proses bisnis, Standar Pelayanan Minimal dan risk managemen;
 9. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan penguji/verifikasi keuangan

SKPD;

10. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan, analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
 11. Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
 12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub bagian Perencanaan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan yang telah dilaksanakan;
- (3) Melaporkan Kegiatan Subbagian Perencanaan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan kepada Sekretaris; dan
1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

c. Kepala Bidang di BAPPEDA:

1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah meliputi perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok sub-substansi, yaitu :

- a) Kelompok Sub-substansi Perencanaan dan Pendanaan
- b) Kelompok Sub-substansi Data dan Informasi

c) Kelompok Sub-substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

2) Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan manusia, Perekonomian dan infrastruktur meliputi pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok sub-substansi, yaitu :

- a) Kelompok Sub-substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- b) Kelompok Sub-substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- c) Kelompok Sub-substansi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

3) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Kepala Bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) mempunyai tugas Menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan,

- a. koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan daerah meliputi sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi.
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
- c. Penyusunan program kerja bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;

- e. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- g. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbang) dibantu 2 (dua) Kelompok Sub-substansi yaitu:

- a) Kelompok Sub-substansi Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
- b) Kelompok Sub-substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG.

Pasa II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 77) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 27 yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

- (5) Penetapan uraian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 36
- (1) Uraian tugas untuk setiap jabatan di lingkungan Badan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai uraian tugas kelompok Sub-Substansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengubah lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasa III

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

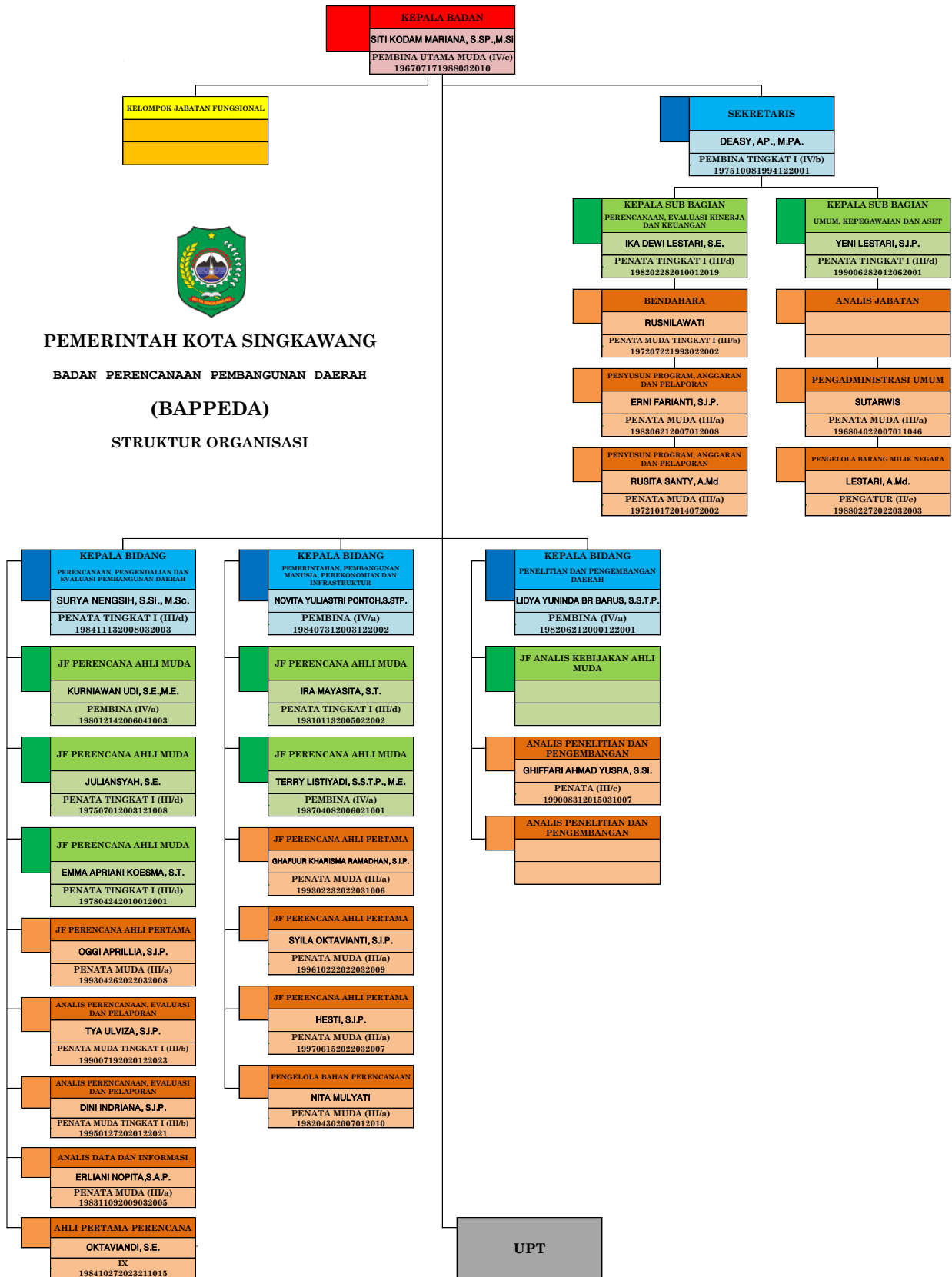


PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)

STRUKTUR ORGANISASI



2. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang memiliki sumber daya aparatur yang cukup baik secara kualitas namun kurang secara kuantitas. Secara kuantitas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda pada saat ini sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) orang, yang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Jumlah tersebut dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang diberikan.

Ditinjau dari jenjang kepangkatan maupun golongan, sumber daya Daerah aparatur yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Singkawang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

✚ PembinaUtamaMuda	IV/c	=	1Orang
✚ PembinaTk.I	IV/b	=	1Orang
✚ Pembina	IV/a	=	3Orang
✚ PenataTk.I	III/d	=	7Orang
✚ Penata	III/c	=	1Orang
✚ PenataMudaTk.I	III/b	=	3Orang
✚ PenataMuda	III/a	=	9Orang
✚ PengaturTk.I	II/d	=	-Orang
✚ Pengatur	II/c	=	1Orang
✚ PenataMuda	IX	=	1Orang

Sedangkan gambaran persebaran sumber daya aparatur Bappeda Kota Singkawang menurut jenis kelamin dan menurut pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Jabatan/Bidang	Tingkat Pendidikan										
		SMU		D1		D3		DIV/S1		S2		
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Kepala BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	1	-	-	-	2	-	3	-	1	
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	-	-	-	-	2	5	1	1	
4	Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	-	1	-	-	-	-	1	4	1	-	
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
Jumlah		1	2	-	-	-	2	4	13	2	3	

Sumber: Sekertariat BAPPEDA, 2024

3. Sumber Daya Keuangan

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah seluruh anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2023 dapat dicermati sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja.

Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD Kota Singkawang dengan pagu dana setelah perubahan sebesar Rp. 7.755.879.961,- terdiri dari Belanja Operasi dan belanja Modal sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Tabel Jenis Belanja pada Anggaran Belanja
Bappeda Kota Singkawang

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)
Belanja Operasi	7.421.397.131,00
Belanja Modal	334.482.830,00
JUMLAH	7.755.879.961,00

Selanjutnya rincian realisasi untuk kedua jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

1. Belanja Operasi

- a) Belanja Operasi adalah salah satu komponen dalam anggaran keuangan pemerintah yang mencakup seluruh pengeluaran untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari instansi atau lembaga pemerintahan. Pengeluaran ini mencakup berbagai biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok pemerintah daerah, termasuk untuk penyelenggaraan pelayanan publik, pemeliharaan fasilitas, serta pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk operasional kegiatan pemerintahan. Komponen dalam belanja operasi dapat tergambar pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Tabel Jenis Belanja Pegawai pada Anggaran Belanja
Bappeda Kota Singkawang

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)
Gaji dan Tunjangan	2.064.526.089,00
Tambahan Penghasilan ASN	1.084.252.684,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	77.310.000,00
Belanja Barang Dan Jasa	4.195.308.358,00
JUMLAH	7.755.879.961,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada kegiatan terdiri dari belanja peralatan dan mesin yaitu biaya untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan atau pelayanan publik yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4

Tabel Jenis Belanja Pegawai pada Anggaran Belanja Bappeda Kota Singkawang

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)
Belanja Modal	334.482.830,00
JUMLAH	334.482.830,00

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.5
Saranadan Prasarana yang dimiliki Bappeda Kota Singkawang
Tahun 2024

No.	Sarana/prasarana	Satuan	2022
1.	Tanah	Bidang	3
2.	Mobil Dinas	Unit	4
3.	Sepeda Motor	Unit	10
4.	Sepeda Motor	Unit	5
5.	Global Positioning System	Unit	1
6.	Mesin Ketik Manual	Unit	2
7.	Mesin Hitung Elektronik	Unit	1
8.	Lemari Besi	Unit	18
9.	Rak Kayu	Unit	2
10.	Filling Cabinet Besi	Unit	25

11.	Brangkas	Unit	1
12.	Lemari Pakaian Gantung	Unit	1
13.	Copy Board/Electric White Board	Unit	2
14.	Mesin Absensi	Unit	1
15.	Overhead Projector	Unit	1
16.	Display	Unit	1
17.	LCD Projektor	Unit	4
18.	Papan Pengumuman	Unit	1
19.	Teralis	Unit	4
20.	Alat Kantor Lainnya Lain-lain	Unit	1
21.	Meja Rapat	Unit	29
22.	Tempat Tidur	Unit	1
23.	Meja ½ Biro	Unit	16
24.	Kursi Tamu	Unit	3
25.	Meja Komputer	Unit	1
26.	Partisi	Unit	1
27.	Meubelair Lain-lain	Unit	11
28.	Lemari Es	Unit	3
29.	AC Split	Unit	16
30.	Alat Pendingin Lain-lain	Unit	27
31.	Kompor Gas	Unit	1
32.	Televisi	Unit	5
33.	Sound system	Unit	6
34.	Stabilisator	Unit	1

35.	Dispenser	Unit	13
36.	Karpet	Unit	1
37.	Vertikal Blind	M2	30
38.	Lampu	Set	1
40.	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	16
41.	Alat Pemadam /Portable	Unit	4
42.	Meja Kerja Pejabat Esselon II	Unit	3
43.	Meja Kerja Pejabat Esselon III	Unit	7
44.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	4
45.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	33
46.	Meja Tamu Biasa	Unit	1
47.	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	Unit	1
48.	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	Unit	12
49.	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	Unit	1
50.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	49
51.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	27
52.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	Unit	2
53.	Lemari Buku untuk perpustakaan	Unit	1
54.	Lemari Buku arsip untuk Arsip Dinamis	Unit	7
55.	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	Unit	8
56.	Microphone	Unit	2
57.	Uninterruptible Power Suply (UPS)	Unit	7
58.	Proyektor+Attachment	Set	3
59.	Handy Cam	Unit	1

60.	CCTV	Unit	1
61.	Tripod Camera	Unit	2
62.	Camera Digital	Unit	9
63.	Video Conference	Unit	1
64.	Peralatan Studio Video Dan Film Lin-lain	Unit	1
65.	Alat Studio Lainnya Lain-lain	Unit	1
66.	Facsimile	Unit	3
58.	Proyektor+Attachment	Set	3
59.	Handy Cam	Unit	1
67.	Loud speaker	Unit	2
68.	Mini Komputer	Unit	1
69.	Komputer Jaringan Lain-lain	Unit	1
70.	P.C Unit	Unit	48
71.	Laptop	Unit	18
72.	NoteBook	Unit	6
73.	TabletPC	Unit	8
74.	Personal Komputer Lain-lain	Unit	5
75.	Serial Printer	Unit	1
76.	Hard Disk	Unit	22
77.	Peralatan Komputer Mini lain-lain	Unit	9
78.	Monitor	Unit	2
79.	Printer	Unit	47
80.	Scanner	Unit	6
81.	Keyboard	Unit	6

82.	Peralatan Personal Komputer lain-lain	Unit	3
83.	Server	Unit	2
84.	Hub	Unit	6
85.	Acces Point	Unit	5
86.	Peralatan Jaringan lainnya	Unit	1
87.	Alat Tenis Meja	Unit	1
88.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Gedung	1
89.	Rumah Negara Golongan II Lain-Lain	Unit	1
90.	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	Instalasi	1
91.	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	Unit	2
92.	Buku Umum Lain-lain	Unit	3
93.	Software	Unit	6
94.	Video Convergence	Unit	1
95.	Webcam Logitech	Unit	1
96.	Alat tudio Lainnya Lain-lain	Unit	1
97.	Peralatan Komputerl ainnya Lain-Lain (Proyektor)	Unit	1
98.	Meja Komputer	Unit	1
99.	Alat Pemadam/Portable	Unit	4
90.	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	Instalasi	1
91.	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	Unit	2
92.	Buku Umum Lain-lain	Unit	3
93.	Software	Unit	6
94.	Video Convergence	Unit	1
95.	Webcam Logitech	Unit	1

96.	Alat tudio Lainnya Lain-lain	Unit	1
97.	Peralatan Komputerl ainnya Lain-Lain (Proyektor)	Unit	1
98.	Meja Komputer	Unit	1
99.	Alat Pemadam/Portable	Unit	4
96.	Alat tudio Lainnya Lain-lain	Unit	1
97.	Peralatan Komputerl ainnya Lain-Lain (Proyektor)	Unit	1
98.	Meja Komputer	Unit	1
99.	Alat Pemadam/Portable	Unit	4

Sumber: Sekretariat BAPPEDA 2024

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024, disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang disusun sebagai bagian dari upaya untuk mendukung sistem administrasi yang efektif, efisien, dan profesional. Penyusunan laporan keuangan ini bertujuan sebagai umpan balik (feedback) yang dapat digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang bertujuan untuk menggambarkan kecukupan anggaran periode berjalan dalam membiayai seluruh pengeluaran, memperlihatkan kesesuaian alokasi sumber daya ekonomi dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, serta menyajikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil yang telah dicapai. Laporan ini juga menunjukkan bagaimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang mendanai seluruh kebutuhan kasnya, menjabarkan posisi keuangan, dan kondisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, serta membandingkan perubahan posisi keuangan selama periode pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilaksanakan.
3. Realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang pada tahun anggaran 2024 mampu mencapai 96,28 persen dari plafon belanja yang tercantum dalam APBD tahun 2024.
4. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Walikota Singkawang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Demikianlah laporan keuangan ini disusun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam proses penyusunan laporan ini, kerja keras dan koordinasi yang baik dalam mempersiapkan data telah memungkinkan laporan keuangan ini dapat tersaji dengan baik.

Dan diharapkan bahwa penyusunan laporan keuangan di masa mendatang dapat berjalan lebih lancar dan efektif, sehingga dapat menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas, akuntabel, dan transparan. Dalam upaya untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, kami berharap laporan keuangan ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik ke depannya.

Kami juga mengakui bahwa penyusunan laporan keuangan ini adalah suatu proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, di masa yang akan datang, kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam sistem akuntansi, pelaporan, serta pengelolaan keuangan daerah agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih optimal, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Singkawang.

Dengan adanya laporan keuangan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang dan meyakinkan seluruh pihak bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan Rahmat dan Kuasa-Nya seluruh rangkaian kegiatan berkenaan dengan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat Menyusun dan menyelesaikan Laporan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Bappeda Kota Singkawang selama tahun anggaran 2024. Dokumen ini menggambarkan secara transparan dan akuntabel kondisi keuangan serta realisasi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan strategis dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan, Bappeda berkomitmen untuk mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang berdampak nyata bagi kemajuan daerah. Oleh karena itu, laporan keuangan ini tidak hanya menjadi wujud kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga merupakan alat evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan guna memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan sesuai prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam proses penyusunan laporan ini, kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyajikan data dan informasi keuangan secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Namun, kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan dalam penyajian laporan ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada jajaran pimpinan, tim keuangan, serta seluruh pegawai Bappeda Kota Singkawang yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengambilan kebijakan serta perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Semoga dengan disampaikan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dan jembatan menuju pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai perwujudan *good governance* dan *clean governance*.

Singkawang, 31 Desember 2024

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang**



Siti KODAM MARIANA, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670717 198803 2 010

**STOCK OPNAME
BARANG PAKAI HABIS SEMESTER II TAHUN 2024
ALAT TULIS KANTOR (ATK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG**

NO	JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH PENGADAAN	JUMLAH YANG DISALURKAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SISA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ballpoint (Balliner)	Buah	189	184	Rp 18,000	Rp 3,402,000	5	Rp 90,000	
2	Ballpoint (Pilot)	Lusin	39	38	Rp 23,500	Rp 916,500	1	Rp 23,500	
3	Binder Clip No. 105	Kotak	85	82	Rp 3,500	Rp 297,500	3	Rp 10,500	
4	Binder Clip No. 107	Kotak	85	83	Rp 4,400	Rp 374,000	2	Rp 8,800	
5	Binder Clip No. 111	Kotak	64	61	Rp 7,500	Rp 480,000	3	Rp 22,500	
6	Binder Clip No. 155	Kotak	81	78	Rp 9,200	Rp 745,200	3	Rp 27,600	
7	Binder Clip No. 200	Kotak	65	63	Rp 14,900	Rp 968,500	2	Rp 29,800	
8	Binder Clip No. 260	Kotak	37	35	Rp 20,700	Rp 765,900	2	Rp 41,400	
9	Clip Paper No. 1	Kotak	0	0	Rp 3,000	Rp -	0	Rp -	
10	Clip Paper No. 3	Kotak	66	63	Rp 4,100	Rp 270,600	3	Rp 12,300	
11	Clip Paper No. 5	Kotak	67	67	Rp 6,900	Rp 462,300	0	Rp -	
12	Double Tape (1 Inch)	Buah	25	25	Rp 8,100	Rp 202,500	0	Rp -	
13	Double Tape (2 Inch)	Buah	38	38	Rp 14,900	Rp 566,200	0	Rp -	
14	Double Tape (1/2 Inch)	Buah	26	26	Rp 4,600	Rp 119,600	0	Rp -	
15	File Box Plastik	Buah	50	47	Rp 19,800	Rp 990,000	3	Rp 59,400	
16	Isi Pisau Cutter Besar	Kotak	14	14	Rp 7,500	Rp 105,000	0	Rp -	
17	Isi Pisau Cutter Kecil	Kotak	0	0	Rp 3,500	Rp -	0	Rp -	
18	Isi Stapler No. 10	Kotak	11	11	Rp 32,100	Rp 353,100	0	Rp -	
19	Isi Stapler No. 3	Kotak	0	0	Rp 4,500	Rp -	0	Rp -	
20	Lakban Hitam (1,5 Inch)	Buah	15	15	Rp 15,200	Rp 228,000	0	Rp -	
21	Lakban Hitam (2 Inch)	Buah	10	10	Rp 19,500	Rp 195,000	0	Rp -	
22	Lakban Bening	Buah	10	10	Rp 17,000	Rp 170,000	0	Rp -	
23	Lakban Cokelat	Buah	15	15	Rp 16,600	Rp 249,000	0	Rp -	
24	Lem Stick 15 Gr	Buah	25	25	Rp 8,600	Rp 215,000	0	Rp -	
25	Lem Stick 25 Gr	Buah	0	0	Rp -	Rp -	0	Rp -	
26	Map Kertas	Dos	22	21	Rp 49,300	Rp 1,084,600	1	Rp 49,300	
27	Map Folio (Snelhecter)	Buah	250	245	Rp 1,200	Rp 300,000	5	Rp 6,000	
28	Map Batik	Buah	140	135	Rp 2,900	Rp 406,000	5	Rp 14,500	
29	Map Gobi (Besar)	Buah	142	136	Rp 28,700	Rp 4,075,400	6	Rp 172,200	
30	Map Gobi (Kecil)	Buah	0	0	Rp 20,000	Rp -	0	Rp -	
31	Pensil Steadler 2B	Lusin	3	1	Rp 41,800	Rp 125,400	2	Rp 83,600	
32	Penggaris Besi 30 cm	Buah	21	18	Rp 9,200	Rp 193,200	3	Rp 27,600	
33	Penghapus Pensil	Buah	50	45	Rp 1,500	Rp 75,000	5	Rp 7,500	
34	Pisau Cutter Besar	Buah	25	23	Rp 16,500	Rp 412,500	2	Rp 33,000	
35	Pisau Cutter Kecil	Buah	23	23	Rp 5,900	Rp 135,700	0	Rp -	
36	Spidol Snowman Permanen	Buah	42	40	Rp 8,800	Rp 369,600	2	Rp 17,600	
37	Spidol Snowman White Board	Buah	45	43	Rp 9,300	Rp 418,500	2	Rp 18,600	
38	Stabilo	Buah	34	31	Rp 9,800	Rp 333,200	3	Rp 29,400	
39	Stapler No. 10	Buah	20	20	Rp 30,680	Rp 613,600	0	Rp -	
40	Stapler No. 3	Buah	15	15	Rp 51,600	Rp 774,000	0	Rp -	
41	Tinta Stempel	Botol	10	8	Rp 12,200	Rp 122,000	2	Rp 24,400	
42	Tip-Ex	Buah	27	24	Rp 5,000	Rp 135,000	3	Rp 15,000	
43	box Arsip	Buah	102	95	Rp 32,100	Rp 3,274,200	7	Rp 224,700	
44	Stapler Tangan	Buah	10	10	Rp 113,400	Rp 1,134,000	0	Rp -	
45	Pelubang Kertas	Buah	3	3	Rp 34,400	Rp 103,200	0	Rp -	
	JUMLAH		2001	1926		Rp 26,161,000	75	Rp 1,049,200	

Mengetahui
Kepala Bappeda Kota Singkawang,



SITI KODAM MARIANA, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196707171988032010

Singkawang, 31 Desember 2024

Pengurus Barang Pengguna,



LESTARI, A.Md
Pengatur
NIP 198802272022032003

STOCK OPNAME
BARANG PAKAI HABIS SEMESTER II TAHUN 2024
KERTAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NO	JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH PENGADAAN	JUMLAH YANG DISALURKAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SISA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kertas Cover	rim	13	13	Rp 50,960	Rp 662,480	0	Rp -	
2	Kertas HVS A4	Rim	131	130	Rp 71,800	Rp 9,405,800	1	Rp 71,800	
3	Kertas HVS F4	Rim	63	62	Rp 69,400	Rp 4,372,200	1	Rp 69,400	
4	Kertas HVS Warna	Rim	0	0	Rp 84,000	Rp -	0	Rp -	
5	Amplop Cokelat (Tali) uk. 25.25	Buah	100	100	Rp 1,600	Rp 160,000	0	Rp -	
6	Amplop Cokelat (Tali) uk. 30x40	Buah	137	137	Rp 1,400	Rp 191,800	0	Rp -	
7	Amplop Putih (No. 90)	Pak	27	27	Rp 25,200	Rp 680,400	0	Rp -	
8	Amplop Putih (No. 110)	Pak	14	14	Rp 22,000	Rp 308,000	0	Rp -	
	Amplop Coklat Kabinet	pak	53	53	Rp 16,500	Rp 874,500	0	Rp -	
	Kertas Quarto	Rim	40	40	Rp 71,500	Rp 2,860,000	0	Rp -	
	JUMLAH		578	576		Rp 19,515,180	2	Rp 141,200	

Mengetahui
Kepala Bappeda Kota Singkawang,



SITI KODAM MARIANA, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196707171988032010

Singkawang, 31 Desember 2024

Pengurus Barang Pengguna,



LESTARI, A.Md
Pengatur
NIP 198802272022032003

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
SKPD : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	7.755.879.961,00	7.467.497.097,00	96,28	7.056.181.313,00
5.1.	BELANJA OPERASI	7.421.397.131,00	7.168.925.380,00	96,60	6.541.721.313,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.226.088.773,00	3.071.093.371,00	95,20	2.934.680.708,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.064.526.089,00	1.978.571.862,00	95,84	1.804.364.580,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.467.645.645,00	1.441.971.497,00	98,25	1.322.948.375,00
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	1.422.346.741,00	1.397.121.097,00	98,23	1.319.692.195,00
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.298.904,00	44.850.400,00	99,01	3.256.180,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	151.483.889,00	150.138.808,00	99,11	125.324.883,00
5.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	145.142.042,00	143.859.752,00	99,12	124.909.573,00
5.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.341.847,00	6.279.056,00	99,01	415.310,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	121.326.250,00	118.425.000,00	97,61	125.355.000,00
5.1.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	121.326.250,00	118.425.000,00	97,61	125.355.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	37.601.997,00	35.757.350,00	95,09	7.160.000,00
5.1.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	30.542.400,00	30.542.400,00	100,00	7.160.000,00
5.1.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.059.597,00	5.214.950,00	73,87	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.037.000,00	32.590.000,00	95,75	40.105.000,00
5.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.310.000,00	29.890.000,00	95,46	39.920.000,00
5.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.727.000,00	2.700.000,00	99,01	185.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	85.066.704,00	83.717.520,00	98,41	77.561.820,00
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PNS	80.970.629,00	79.662.000,00	98,38	77.561.820,00
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.096.075,00	4.055.520,00	99,01	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	36.542.556,00	7.745.482,00	21,20	4.601.640,00
5.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	36.542.556,00	7.745.482,00	21,20	4.601.640,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.040,00	20.600,00	70,94	20.618,00
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.109,00	20.108,00	71,54	20.531,00
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	931,00	492,00	52,85	87,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	118.688.832,00	96.378.147,00	81,20	90.561.429,00
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	115.143.265,00	93.483.899,00	81,19	90.346.437,00
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.545.567,00	2.894.248,00	81,63	214.992,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.026.014,00	2.956.837,00	97,71	2.681.446,00
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.932.823,00	2.864.569,00	97,67	2.674.326,00
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	93.191,00	92.268,00	99,01	7.120,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.078.162,00	8.870.621,00	97,71	8.044.369,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.798.602,00	8.593.829,00	97,67	8.023.010,00
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	279.560,00	276.792,00	99,01	21.359,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.084.252.684,00	1.019.211.509,00	94,00	999.336.128,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.020.526.290,00	956.402.509,00	93,72	951.133.128,00
5.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	994.267.448,00	933.345.073,00	93,87	949.385.092,00
5.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	26.258.842,00	23.057.436,00	87,81	1.748.036,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	63.726.394,00	62.809.000,00	98,56	48.203.000,00
5.1.01.02.03.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	63.726.394,00	62.809.000,00	98,56	48.203.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	77.310.000,00	73.310.000,00	94,83	130.980.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	70.260.000,00	66.260.000,00	94,31	116.880.000,00
5.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	66.180.000,00	62.180.000,00	93,96	108.720.000,00
5.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	100,00	8.160.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00	14.100.000,00
5.1.01.03.08.00	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00	14.100.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.195.308.358,00	4.097.832.009,00	97,68	3.607.040.605,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.340.395.965,00	1.310.089.509,00	97,74	743.582.534,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.340.395.965,00	1.310.089.509,00	97,74	743.582.534,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.003.080,00	16.000.000,00	99,98	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Baku	-	-	-	3.919.800,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	90.164.200,00	88.093.411,00	97,70	62.416.840,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	69.601.089,00	68.407.166,00	98,28	38.093.320,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	159.166.712,00	153.188.700,00	96,24	142.613.244,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	65.888.883,00	64.052.300,00	97,21	31.086.200,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	71.766.080,00	71.670.038,00	99,87	23.727.350,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	33.580.086,00	33.327.700,00	99,25	21.873.750,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	-	-	30.000.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	8.794.000,00	6.510.500,00	74,03	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	708.000,00	655.200,00	92,54	23.374.180,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.699.400,00	4.860.000,00	85,27	2.750.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.00	Belanja Natura dan Pakan-Natura	16.668.500,00	16.659.828,00	99,95	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	675.242.255,00	660.794.666,00	97,86	197.418.050,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	68.189.800,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	-	-	8.400.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	65.890.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Adat Daerah	55.999.680,00	55.200.000,00	98,57	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Batik Tradisional	34.114.000,00	33.670.000,00	98,70	-
5.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	21.830.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.542.514.696,00	1.513.138.970,00	98,10	1.089.066.029,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.118.517.228,00	1.093.699.441,00	97,78	887.996.322,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.300.000,00	32.050.000,00	93,44	9.300.000,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	37.850.000,00	37.850.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.00	Honorarium Rohaniwan	600.000,00	600.000,00	100,00	510.000,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	60.450.000,00	55.950.000,00	92,56	124.250.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	249.600.000,00	249.600.000,00	100,00	171.600.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	-	-	52.000.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	43.139.400,00	41.492.250,00	96,18	49.114.980,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	-	-	-	26.000.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	10.500.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.230.000,00	1.230.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Telepon	3.193.442,00	2.470.319,00	77,36	908.441,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	1.443.955,00	935.551,00	64,79	17.504.732,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	120.210.963,00	120.202.053,00	99,99	77.060.612,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.938.400,00	4.450.000,00	64,14	4.680.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	26.998.068,00	24.882.668,00	92,16	30.531.557,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Paket/Pengiriman	-	-	-	72.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Registrasi/Keanggotaan	9.000.000,00	8.200.000,00	91,11	2.800.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.000.000,00	1.427.600,00	71,38	-
5.1.02.02.01.00	Belanja Lembur	472.763.000,00	463.559.000,00	98,05	311.164.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.897.468,00	10.410.140,00	80,71	201.069.707,00
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.897.468,00	10.410.140,00	80,71	12.169.707,00
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	-	-	188.900.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	411.100.000,00	409.029.389,00	99,50	-
5.1.02.02.09.00	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	411.100.000,00	409.029.389,00	99,50	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	284.359.356,00	272.909.820,00	95,97	111.709.839,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.297.325,00	85.866.420,00	88,25	108.209.839,00
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.750.125,00	33.909.128,00	87,51	37.750.703,00
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	38.507.200,00	31.917.292,00	82,89	46.344.136,00
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.080.000,00	9.080.000,00	100,00	6.145.000,00
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.060.000,00	4.060.000,00	100,00	13.741.000,00
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	4.229.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187.062.031,00	187.043.400,00	99,99	3.500.000,00
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	187.062.031,00	187.043.400,00	99,99	3.500.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	967.038.341,00	951.693.732,00	98,41	1.620.082.203,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	967.038.341,00	951.693.732,00	98,41	1.239.191.411,00
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	760.803.341,00	754.080.732,00	99,12	1.065.827.411,00
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	161.680.000,00	153.628.000,00	95,02	159.114.000,00
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	44.555.000,00	43.985.000,00	98,72	14.250.000,00
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	380.890.792,00
5.1.02.04.02.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	-	-	-	380.890.792,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.000.000,00	49.999.978,00	81,97	42.600.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.000.000,00	49.999.978,00	81,97	42.600.000,00
5.1.02.05.01.00	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	42.000.000,00	31.000.000,00	73,81	30.000.000,00
5.1.02.05.01.00	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	19.000.000,00	18.999.978,00	100,00	12.600.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	334.482.830,00	298.571.717,00	89,26	514.460.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.482.830,00	298.571.717,00	89,26	326.650.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	177.407.130,00	158.821.717,00	89,52	82.900.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	15.000.000,00	12.900.000,00	86,00	1.330.000,00
5.2.02.05.01.00	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	12.900.000,00	86,00	1.330.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	162.407.130,00	145.921.717,00	89,85	81.570.000,00
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Mebel	105.328.180,00	104.416.717,00	99,13	30.100.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Pendingin	40.956.820,00	33.250.000,00	81,18	42.120.000,00
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Dapur	1.262.600,00	1.120.000,00	88,71	-
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.859.530,00	7.135.000,00	48,02	350.000,00
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	9.000.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.788.000,00	5.700.000,00	73,19	5.300.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	7.788.000,00	5.700.000,00	73,19	5.300.000,00
5.2.02.06.01.00	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.788.000,00	5.700.000,00	73,19	5.300.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	149.287.700,00	134.050.000,00	89,79	238.450.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	128.330.900,00	115.750.000,00	90,20	152.300.000,00
5.2.02.10.01.00	Belanja Modal Personal Computer	128.330.900,00	115.750.000,00	90,20	152.300.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.956.800,00	18.300.000,00	87,32	86.150.000,00
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Mainframe	-	-	-	8.750.000,00
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	20.956.800,00	18.300.000,00	87,32	77.400.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	187.810.000,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	187.810.000,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	187.810.000,00
5.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	187.810.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.755.879.961,00)	(7.467.497.097,00)	96,28	(7.056.181.313,00)

Singkawang, Selasa, 31 Desember 2024

Kepala Bappeda



SITI KODAM MARIANA, S.IP., M.Si.

NIP. 19670717 198803 2 010

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN DAERAH				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	3.071.093.371,00	2.934.680.708,00	136.412.663,00	4,44
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.978.571.862,00	1.804.364.580,00	174.207.282,00	8,80
Beban Gaji Pokok ASN	1.441.971.497,00	1.322.948.375,00	119.023.122,00	8,25
Beban Gaji Pokok PNS	1.397.121.097,00	1.319.692.195,00	77.428.902,00	5,54
Beban Gaji Pokok PPPK	44.850.400,00	3.256.180,00	41.594.220,00	92,74
Beban Tunjangan Keluarga ASN	150.138.808,00	125.324.883,00	24.813.925,00	16,53
Beban Tunjangan Keluarga PNS	143.859.752,00	124.909.573,00	18.950.179,00	13,17
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	6.279.056,00	415.310,00	5.863.746,00	93,39
Beban Tunjangan Jabatan ASN	118.425.000,00	125.355.000,00	(6.930.000,00)	(5,85)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	118.425.000,00	125.355.000,00	(6.930.000,00)	(5,85)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	35.757.350,00	7.160.000,00	28.597.350,00	79,98
Beban Tunjangan Fungsional PNS	30.542.400,00	7.160.000,00	23.382.400,00	76,56
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5.214.950,00	-	5.214.950,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.590.000,00	40.105.000,00	(7.515.000,00)	(23,06)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.890.000,00	39.920.000,00	(10.030.000,00)	(33,56)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.700.000,00	185.000,00	2.515.000,00	93,15
Beban Tunjangan Beras ASN	83.717.520,00	77.561.820,00	6.155.700,00	7,35
Beban Tunjangan Beras PNS	79.662.000,00	77.561.820,00	2.100.180,00	2,64
Beban Tunjangan Beras PPPK	4.055.520,00	-	4.055.520,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.745.482,00	4.601.640,00	3.143.842,00	40,59
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.745.482,00	4.601.640,00	3.143.842,00	40,59
Beban Pembulatan Gaji ASN	20.600,00	20.618,00	(18,00)	(0,09)
Beban Pembulatan Gaji PNS	20.108,00	20.531,00	(423,00)	(2,10)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	492,00	87,00	405,00	82,32
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	96.378.147,00	90.561.429,00	5.816.718,00	6,04
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	93.483.899,00	90.346.437,00	3.137.462,00	3,36
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.894.248,00	214.992,00	2.679.256,00	92,57
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.956.837,00	2.681.446,00	275.391,00	9,31
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.864.569,00	2.674.326,00	190.243,00	6,64
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	92.268,00	7.120,00	85.148,00	92,28
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.870.621,00	8.044.369,00	826.252,00	9,31
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	8.593.829,00	8.023.010,00	570.819,00	6,64
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	276.792,00	21.359,00	255.433,00	92,28
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.019.211.509,00	999.336.128,00	19.875.381,00	1,95
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	956.402.509,00	951.133.128,00	5.269.381,00	0,55

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	933.345.073,00	949.385.092,00	(16.040.019,00)	(1,72)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	23.057.436,00	1.748.036,00	21.309.400,00	92,42
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	62.809.000,00	48.203.000,00	14.606.000,00	23,25
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	62.809.000,00	48.203.000,00	14.606.000,00	23,25
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	73.310.000,00	130.980.000,00	(57.670.000,00)	(78,67)
Beban Honorarium	66.260.000,00	116.880.000,00	(50.620.000,00)	(76,40)
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	62.180.000,00	108.720.000,00	(46.540.000,00)	(74,85)
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00	8.160.000,00	(4.080.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	7.050.000,00	14.100.000,00	(7.050.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.050.000,00	14.100.000,00	(7.050.000,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa	3.874.685.459,00	3.540.959.005,00	333.726.454,00	8,61
Beban Barang	1.309.478.609,00	744.238.934,00	565.239.675,00	43,17
Beban Barang Pakai Habis	1.309.478.609,00	744.238.934,00	565.239.675,00	43,17
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.000.000,00	-	16.000.000,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Baku	-	3.919.800,00	(3.919.800,00)	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	87.379.711,00	62.887.240,00	24.492.471,00	28,03
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	68.509.966,00	38.279.320,00	30.230.646,00	44,13
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	153.188.700,00	142.613.244,00	10.575.456,00	6,90
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	50,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	64.052.300,00	31.086.200,00	32.966.100,00	51,47
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	71.670.038,00	23.727.350,00	47.942.688,00	66,89
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	33.327.700,00	21.873.750,00	11.453.950,00	34,37
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	30.000.000,00	(30.000.000,00)	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	6.510.500,00	-	6.510.500,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	655.200,00	23.374.180,00	(22.718.980,00)	(3.467,49)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.860.000,00	2.750.000,00	2.110.000,00	43,42
Beban Natura dan Pakan-Natura	16.659.828,00	-	16.659.828,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	660.794.666,00	197.418.050,00	463.376.616,00	70,12
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	33.000.000,00	68.189.800,00	(35.189.800,00)	(106,64)
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	8.400.000,00	(8.400.000,00)	-
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	65.890.000,00	(65.890.000,00)	-
Beban Pakaian Adat Daerah	55.200.000,00	-	55.200.000,00	100,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	33.670.000,00	-	33.670.000,00	100,00
Beban Pakaian Olahraga	-	21.830.000,00	(21.830.000,00)	-
Beban Jasa	1.477.646.720,00	1.052.328.029,00	425.318.691,00	28,78
Beban Jasa Kantor	1.058.207.191,00	851.258.322,00	206.948.869,00	19,56

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.050.000,00	9.300.000,00	22.750.000,00	70,98
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	37.850.000,00	-	37.850.000,00	100,00
Beban Honorarium Rohaniwan	600.000,00	510.000,00	90.000,00	15,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	55.950.000,00	124.250.000,00	(68.300.000,00)	(122,07)
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.000.000,00	-	5.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	249.600.000,00	171.600.000,00	78.000.000,00	31,25
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	52.000.000,00	(52.000.000,00)	-
Beban Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00	12.376.980,00	(6.376.980,00)	(106,28)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.800.000,00	-	4.800.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	-	26.000.000,00	(26.000.000,00)	-
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00	10.500.000,00	(1.500.000,00)	(16,67)
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	30.000.000,00	-	30.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.230.000,00	-	1.230.000,00	100,00
Beban Tagihan Telepon	2.470.319,00	908.441,00	1.561.878,00	63,23
Beban Tagihan Air	935.551,00	17.504.732,00	(16.569.181,00)	(1.771,06)
Beban Tagihan Listrik	120.202.053,00	77.060.612,00	43.141.441,00	35,89
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.450.000,00	4.680.000,00	(230.000,00)	(5,17)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.882.668,00	30.531.557,00	(5.648.889,00)	(22,70)
Beban Paket/Pengiriman	-	72.000,00	(72.000,00)	-
Beban Registrasi/Keanggotaan	8.200.000,00	2.800.000,00	5.400.000,00	65,85
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.427.600,00	-	1.427.600,00	100,00
Beban Lembur	463.559.000,00	311.164.000,00	152.395.000,00	32,87
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	10.410.140,00	12.169.707,00	(1.759.567,00)	(16,90)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.410.140,00	12.169.707,00	(1.759.567,00)	(16,90)
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	409.029.389,00	188.900.000,00	220.129.389,00	53,82
Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	409.029.389,00	188.900.000,00	220.129.389,00	53,82
Beban Pemeliharaan	85.866.420,00	111.709.839,00	(25.843.419,00)	(30,10)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.866.420,00	108.209.839,00	(22.343.419,00)	(26,02)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.909.128,00	37.750.703,00	(3.841.575,00)	(11,33)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	31.917.292,00	46.344.136,00	(14.426.844,00)	(45,20)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.080.000,00	6.145.000,00	2.935.000,00	32,32
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.060.000,00	13.741.000,00	(9.681.000,00)	(238,45)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.900.000,00	4.229.000,00	2.671.000,00	38,71
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	3.500.000,00	(3.500.000,00)	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	3.500.000,00	(3.500.000,00)	-
Beban Perjalanan Dinas	951.693.732,00	1.620.082.203,00	(668.388.471,00)	(70,23)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	951.693.732,00	1.239.191.411,00	(287.497.679,00)	(30,21)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	754.080.732,00	1.065.827.411,00	(311.746.679,00)	(41,34)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	153.628.000,00	159.114.000,00	(5.486.000,00)	(3,57)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	43.985.000,00	14.250.000,00	29.735.000,00	67,60
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	380.890.792,00	(380.890.792,00)	-
Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	-	380.890.792,00	(380.890.792,00)	-
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49.999.978,00	12.600.000,00	37.399.978,00	74,80
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49.999.978,00	12.600.000,00	37.399.978,00	74,80
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	31.000.000,00	12.600.000,00	18.400.000,00	59,35
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	18.999.978,00	-	18.999.978,00	100,00
Beban Lain-Lain.	24.386.717,00	-	24.386.717,00	100,00
Beban Lain-Lain..	24.386.717,00	-	24.386.717,00	100,00
Beban Lain-Lain LO	24.386.717,00	-	24.386.717,00	100,00
JUMLAH BEBAN OPERASI	6.970.165.547,00	6.475.639.713,00	494.525.834,00	7,09
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	334.863.862,00	288.854.728,60	46.009.133,40	13,74
Beban Penyusutan Alat Angkutan	41.143.125,00	4.401.250,00	36.741.875,00	89,30
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	41.143.125,00	4.401.250,00	36.741.875,00	89,30
Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.814.375,00	-	38.814.375,00	100,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.328.750,00	4.401.250,00	(2.072.500,00)	(89,00)
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	1.787.500,00	(1.787.500,00)	-
Beban Penyusutan Alat Ukur	-	1.787.500,00	(1.787.500,00)	-
Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	-	1.787.500,00	(1.787.500,00)	-
Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	81.645.382,00	92.517.356,00	(10.871.974,00)	(13,32)
Beban Penyusutan Alat Kantor	1.960.000,00	11.861.674,40	(9.901.674,40)	(505,19)
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.694.000,00	1.694.000,00	-	-
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	266.000,00	10.167.674,40	(9.901.674,40)	(3.722,43)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	59.709.702,00	49.436.277,60	10.273.424,40	17,21
Beban Penyusutan Mebel	22.853.100,00	12.974.350,00	9.878.750,00	43,23
Beban Penyusutan Alat Pendingin	25.304.642,00	20.641.642,00	4.663.000,00	18,43
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.751.960,00	14.020.285,60	(4.268.325,60)	(43,77)
Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	19.975.680,00	31.219.404,00	(11.243.724,00)	(56,29)
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	3.227.600,00	2.897.600,00	330.000,00	10,22
Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	1.610.000,00	1.400.000,00	210.000,00	13,04
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	9.858.080,00	12.673.804,00	(2.815.724,00)	(28,56)
Beban Penyusutan Kursi Tamu di RuanganPejabat	-	4.250.000,00	(4.250.000,00)	-
Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	5.280.000,00	9.998.000,00	(4.718.000,00)	(89,36)
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	29.648.980,00	30.960.997,60	(1.312.017,60)	(4,43)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Alat Studio	29.648.980,00	30.960.997,60	(1.312.017,60)	(4,43)
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	14.260.980,00	16.712.997,60	(2.452.017,60)	(17,19)
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	6.730.000,00	5.590.000,00	1.140.000,00	16,94
Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya	8.658.000,00	8.658.000,00	-	-
Beban Penyusutan Komputer	182.426.375,00	159.187.625,00	23.238.750,00	12,74
Beban Penyusutan Komputer Unit	136.249.000,00	110.701.500,00	25.547.500,00	18,75
Beban Penyusutan Komputer Jaringan	499.750,00	499.750,00	-	-
Beban Penyusutan Personal Computer	135.749.250,00	110.201.750,00	25.547.500,00	18,82
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	46.177.375,00	48.486.125,00	(2.308.750,00)	(5,00)
Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	2.400.000,00	3.550.000,00	(1.150.000,00)	(47,92)
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	24.625.000,00	25.783.750,00	(1.158.750,00)	(4,71)
Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	10.244.625,00	10.244.625,00	-	-
Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	8.907.750,00	8.907.750,00	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.537.782,28	26.744.315,57	6.793.466,71	20,26
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	33.537.782,28	26.744.315,57	6.793.466,71	20,26
Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.525.115,61	18.731.648,91	6.793.466,70	26,61
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	25.525.115,61	18.731.648,91	6.793.466,70	26,61
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	8.012.666,67	8.012.666,66	0,01	-
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	8.012.666,67	8.012.666,66	0,01	-
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.777.365,00	1.777.365,00	-	-
Beban Penyusutan Instalasi	1.777.365,00	1.777.365,00	-	-
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	1.777.365,00	1.777.365,00	-	-
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk	749.275,00	749.275,00	-	-
Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	-	1.028.090,00	(1.028.090,00)	-
Beban Penyusutan Instalasi Gardu ListrikLainnya	1.028.090,00	-	1.028.090,00	100,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.996.000,00	24.002.000,00	(20.006.000,00)	(500,65)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.996.000,00	24.002.000,00	(20.006.000,00)	(500,65)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.996.000,00	24.002.000,00	(20.006.000,00)	(500,65)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	3.996.000,00	24.002.000,00	(20.006.000,00)	(500,65)
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	374.175.009,28	341.378.409,17	32.796.600,11	8,77
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO				
Defisit Non Operasional Lainnya	310.000,00	-	310.000,00	100,00
Defisit Non Operasional Lainnya.	310.000,00	-	310.000,00	100,00
Defisit Non Operasional Lainnya..	310.000,00	-	310.000,00	100,00
Defisit Non Operasional Lainnya LO	310.000,00	-	310.000,00	100,00
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	310.000,00	-	310.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	7.344.650.556,28	6.817.018.122,17	527.632.434,11	7,18
SURPLUS/DEFISIT LO	(7.344.650.556,28)	(6.817.018.122,17)	(527.632.434,11)	7,18

SINGKAWANG, 31 Desember 2024

Kepala Bappeda



SITI KODAM MARIANA, S.IP., M.Si.

NIP. 19670717 198803 2 010

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
N E R A C A
PER 31Desember2024 DAN 2023

Halaman 1 dari 4

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2024	2023
1	2	3
ASET LANCAR	1.190.400,00	579.500,00
Persediaan	1.190.400,00	579.500,00
Barang Pakai Habis	1.190.400,00	579.500,00
Persediaan Alat Tulis Kantor	1.049.200,00	335.500,00
Persediaan Kertas dan Cover	141.200,00	244.000,00
ASET TETAP	19.045.231.277,59	18.761.642.136,89
Tanah	17.459.831.643,93	17.459.831.643,93
Tanah	17.459.831.643,93	17.459.831.643,93
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	4.113.643,93	4.113.643,93
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	17.455.718.000,00	17.455.718.000,00
Peralatan dan Mesin	4.497.350.781,00	4.197.838.281,00
Alat Angkutan	905.165.000,00	628.454.000,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	354.149.000,00	354.149.000,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	310.515.000,00	0
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	192.551.000,00	226.355.000,00
Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	47.950.000,00	47.950.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.937.500,00	8.937.500,00
Alat Ukur Universal	8.937.500,00	8.937.500,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.500.881.923,00	1.436.827.423,00
Mesin Ketik	6.200.000,00	6.200.000,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.500.000,00	3.500.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	122.306.800,00	122.306.800,00
Alat Kantor Lainnya	204.841.232,00	242.388.232,00
Mebel	295.196.700,00	243.196.700,00
Alat Pendingin	305.910.710,00	288.594.210,00
Alat Dapur	900.000,00	900.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	255.124.428,00	252.889.428,00
Alat Pemadam Kebakaran	9.000.000,00	9.000.000,00
Meja Kerja Pejabat	79.044.250,00	69.044.250,00
Meja Rapat Pejabat	15.050.000,00	7.000.000,00
Kursi Kerja Pejabat	116.067.803,00	104.067.803,00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	21.250.000,00	21.250.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	66.490.000,00	66.490.000,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	309.305.169,00	329.355.169,00
Peralatan Studio Audio	101.014.988,00	126.764.988,00
Peralatan Studio Video dan Film	122.434.681,00	116.734.681,00
Alat Studio Lainnya	43.290.000,00	43.290.000,00
Alat Komunikasi Telephone	42.565.500,00	42.565.500,00
Komputer	1.759.047.189,00	1.780.250.189,00
Komputer Jaringan	16.159.000,00	16.159.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2024	2023
1	2	3
Personal Computer	1.206.481.883,00	1.240.063.883,00
Peralatan Mainframe	44.185.000,00	42.926.000,00
Peralatan Mini Computer	16.450.886,00	16.450.886,00
Peralatan Personal Computer	291.560.920,00	280.440.920,00
Peralatan Jaringan	148.578.500,00	148.578.500,00
Peralatan Komputer Lainnya	35.631.000,00	35.631.000,00
Peralatan Olahraga	14.014.000,00	14.014.000,00
Peralatan Olahraga Lainnya	14.014.000,00	14.014.000,00
Gedung dan Bangunan	1.166.210.550,00	943.674.900,00
Bangunan Gedung	1.166.210.550,00	943.674.900,00
Bangunan Gedung Kantor	925.830.550,00	703.294.900,00
Rumah Negara Golongan I	240.380.000,00	240.380.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.094.600,00	71.094.600,00
Instalasi	71.094.600,00	71.094.600,00
Instalasi Gardu Listrik Induk	29.971.000,00	29.971.000,00
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	41.123.600,00	41.123.600,00
Aset Tetap Lainnya	6.480.000,00	6.480.000,00
Bahan Perpustakaan	6.480.000,00	6.480.000,00
Buku Umum	6.480.000,00	6.480.000,00
Akumulasi Penyusutan	(4.155.736.297,34)	(3.917.277.288,04)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.894.803.810,00)	(3.691.659.948,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(548.220.875,00)	(354.149.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(190.222.250,00)	(221.697.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	(47.950.000,00)	(47.950.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(8.937.500,00)	(8.937.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(6.200.000,00)	(6.200.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(3.500.000,00)	(3.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(121.712.800,00)	(120.018.800,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(204.043.232,00)	(241.324.232,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(235.228.600,00)	(212.375.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(243.880.614,00)	(234.509.472,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(900.000,00)	(900.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(244.946.508,00)	(239.194.548,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(3.600.000,00)	(1.800.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(71.044.250,00)	(67.816.650,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(8.610.000,00)	(7.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(96.087.803,00)	(86.229.723,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(21.250.000,00)	(21.250.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(66.490.000,00)	(61.210.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(86.754.008,00)	(110.833.028,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(106.694.681,00)	(99.964.681,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(25.974.000,00)	(17.316.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(42.565.500,00)	(42.565.500,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(15.659.250,00)	(15.159.500,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.011.019.383,00)	(1.024.602.133,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2024	2023
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(39.810.000,00)	(36.151.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	(16.450.886,00)	(16.450.886,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(237.735.920,00)	(222.390.920,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(148.578.500,00)	(138.333.875,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	(26.723.250,00)	(17.815.500,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	(14.014.000,00)	(14.014.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(233.678.197,34)	(200.140.415,04)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(185.602.197,32)	(160.077.081,71)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(48.076.000,02)	(40.063.333,33)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(27.254.290,00)	(25.476.925,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk	(10.489.850,00)	(9.740.575,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Lainnya	(16.764.440,00)	(15.736.350,00)
ASET LAINNYA	7.992.000,00	11.988.000,00
Aset Tidak Berwujud	470.610.000,00	470.610.000,00
Aset Tidak Berwujud	470.610.000,00	470.610.000,00
Software	470.610.000,00	470.610.000,00
Aset Lain-lain	161.503.250,00	492.074.250,00
Aset Lain-lain	161.503.250,00	492.074.250,00
Aset Rusak Berat/Usang	161.503.250,00	492.074.250,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(462.618.000,00)	(458.622.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(462.618.000,00)	(458.622.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-	(462.618.000,00)	(458.622.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(161.503.250,00)	(492.074.250,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(161.503.250,00)	(492.074.250,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya..	(161.503.250,00)	(492.074.250,00)
JUMLAH ASET	19.054.413.677,59	18.774.209.636,89
EKUITAS	19.054.413.677,59	18.774.209.636,89
Ekuitas	11.586.916.580,59	18.774.209.636,89
Ekuitas	18.774.209.636,89	18.774.209.636,89
Ekuitas	18.774.209.636,89	18.774.209.636,89
Surplus/Defisit-LO	(7.344.650.556,28)	0
Surplus/Defisit-LO	(7.344.650.556,28)	0
Dampak Kumulatif Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar	157.357.499,98	0
Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap	157.357.500,00	0
Pembulatan	(0,02)	0
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	7.467.497.097,00	0
RK PPKD	7.467.497.097,00	0
RK PPKD	7.467.497.097,00	0
JUMLAH EKUITAS DANA	19.054.413.677,59	18.774.209.636,89
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	19.054.413.677,59	18.774.209.636,89

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



SITI KODAM MARIANA, S.IP., M.Si.

NIP. NIP :19670717 198803 2 010

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan Selasa, 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	18.774.209.636,89	18.774.209.636,89
RK PPKD	7.467.497.097,00	0,00
Surplus/Defisit-LO	(7.344.650.556,28)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap	157.357.500,00	0,00
Ekuitas Mutasi Keluar Aset Tetap	0,00	0,00
Pembulatan	(0,02)	0,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	19.054.413.677,59	18.774.209.636,89

SINGKAWANG, Selasa, 31 Desember 2024

Kepala Bappeda



SITI KODAM MARIANA, S.IP., M.Si.

NIP. 19670717 198803 2 010